

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian pada bahasan diatas, dalam penelitian ini peneliti perlu mengambil beberapa kesimpulan implementasi kebijakan program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Bantul, DIY tentang pengembangan industri kecil, dengan studi kasus pengembangan industri kecil kerajinan kulit di Manding. Kesimpulan ini adalah sebagai upaya untuk mempermudah dan menyederhanakan deskripsi uraian yang panjang dalam penelitian dengan deskripsi yang lebih ringkas.

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian tersebut dari implementasi kebijakan program pengembangan industri kerajinan kecil, khususnya industri kerajinan kulit pada program Disperindagkop Kabupaten Bantul, dilihat dari a) komunikasi, b) sumber daya, wewenang dan struktur birokrasi secara umum sudah dapat disebut telah berjalan dengan baik, namun apabila dilihat dari masing- masing variabel kebijakan, terutama pada bidang-bidang yang terdapat di Disperindagkop Bantul belum menunjukkan adanya kesamaan visi yang mampu menjembatani perbedaan antar bidang, sehingga keberhasilan yang dicapai dalam implementasi setiap bidang memiliki potensi buruk terhadap bidang yang lain bilamana tidak segera diselesaikan.

1. Dilihat dari Komunikasi, yaitu berkaitan dengan kejelasan konsep kebijakan dan kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan Disperindagkop Kabupaten Bantul, secara umum telah dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana program, dalam hal ini Disperindagkop sendiri, pemilik usaha kerajinan dan pihak-pihak lain yang terkait, terutama mereka yang berada dalam hirarki (struktur) pemerintahan di desa dan kecamatan.
2. Dilihat sumber daya yang digunakan. Pertama, dari sumberdaya alam yang tersedia, di Bantul sudah tercukupi. Program pertanian dan peternakan di Bantul sudah mencukupi ketersediaan bahan baku kulit yang dibutuhkan dalam industri kerajinan kulit, meski dalam prosesnya (proses penyamakan) banyak dilakukan diluar Bantul. Misalnya, pengolahan kulit dilakukan di Balai Kulit yang berada di Kota Yogyakarta. Kedua, dari Sumberdaya manusia, Disperindagkop Kabupaten Bantul telah melakukan pembinaan, pelatihan dan bantuan permodalan meski dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti Bank Indonesia. Bantuan pengembangan SDM, teknologi, keuangan, sarana dan prasarana sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi telah Disperindagkop fasilitasi.
3. Dilihat dari kecenderungan penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana program Disperindagkop Kabupaten Bantul, menunjukkan

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki komitmen baik secara politis maupun operasional.

4. Dilihat dari struktur birokrasi. Hal ini yang menjadi catatan penting dalam penelitian, dilihat dari kuantitasnya koordinasi dan komunikasi antara aktor kebijakan yakni terutama antar instansi terkait sebagai pelaksana dengan seluruh *stakeholders* yang ada sudah cukup baik, tetapi secara kualitas masih membutuhkan penelaahan yang lebih mendalam.

## **B. SARAN**

Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan program Disperindagkop Kabupaten Bantul, maka :

1. Mengembangkan pola kemitraan pelaksanaan program Disperindagkop Kabupaten Bantul, karena program Disperindagkop Kabupaten Bantul pada dasarnya sangat berkaitan dengan program lintas sektor dan lintas program lainnya. Oleh karena itu kemitraan dan kerja sama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta perlu ditingkatkan agar keberhasilan program lebih sinergi.
2. Memanfaatkan program-program keterpaduan antar lembaga dan jejaring Disperindagkop Kabupaten Bantul dengan kegiatan program Dinas-dinas yang lain di Kabupaten Bantul dalam program pembangunan dan pengembangan industri kecil lainnya.
3. Mendorong kemandirian untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi yang telah ada di masyarakat untuk memberikan fasilitas dan dukungan pelaksanaan program Disperindagkop Kabupaten Bantul sehingga diharapkan potensi masyarakat menjadi berkembang dan mandiri.